

MENELUSURI AKAR HISTORIS DAN FAKTOR PENDORONG LAHIRNYA STUDI PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA: DARI PARADIGMA KLASIK KE ERA GLOBAL GOVERNANCE

Sri Yulianty Mozin¹⁾, Alexander H. Badjuka²⁾, Zaskia Shalwa Lawani³⁾, Nadila Liputo⁴⁾,
Rini Ramadhani⁵⁾, Fatralisa D. Pulanding⁶⁾

Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
yulmozin@ung.ac.id

Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
abadjuka@ung.ac.id

Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
zaskiashalwalawani@gmail.com

Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
nadilaliputo@gmail.com

Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
riniramadhani0831@gmail.com

Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
fatralisa0204laydia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akar historis dan faktor-faktor yang mendorong lahirnya studi *Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration/CPA)* serta relevansinya dalam konteks *global governance* kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode studi literatur, penelitian ini menganalisis transformasi paradigma administrasi publik sejak era klasik hingga masa modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa CPA muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori administrasi klasik yang bersifat universalistik dan berorientasi Barat. Faktor-faktor seperti dekolonisasi, modernisasi, dan globalisasi menjadi katalis utama yang menuntut pendekatan administrasi publik yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap keragaman sosial-politik negara berkembang. Tokoh-tokoh seperti Fred W. Riggs, Ferrel Heady, dan Dwight Waldo berperan penting dalam memperluas ruang analisis CPA dari perspektif struktural menuju analisis ekologi dan jejaring global. Kajian ini menegaskan bahwa CPA bukan hanya alat deskriptif untuk membandingkan sistem birokrasi antarnegara, tetapi juga kerangka reflektif untuk memahami bagaimana nilai-nilai klasik birokrasi, rasionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dapat direinterpretasi dalam ekosistem tata kelola global yang kompleks. Dengan demikian, CPA memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan teori administrasi publik klasik dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan adaptif di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

Kata kunci: Administrasi, Birokrasi, Perbandingan

ABSTRACT

This study aims to explore the historical roots and driving factors behind the emergence of Comparative Public Administration (CPA) and its relevance within the context of contemporary global governance. Employing a qualitative-descriptive approach through a comprehensive literature review, the research analyzes the paradigm shifts in public administration from the classical era to the modern governance period. The findings indicate that CPA emerged as a response to the limitations of the Western-centric and universalistic classical administrative theories. Factors such as decolonization, modernization, and globalization served as major catalysts for developing a more contextual and adaptive approach to public administration in developing countries. Scholars such as Fred W. Riggs, Ferrel Heady, and Dwight Waldo played pivotal roles in expanding CPA's analytical scope from structural perspectives to ecological and network-oriented analyses. The study concludes that CPA is not merely a descriptive tool for comparing bureaucratic systems but also a reflective framework for reinterpreting classical bureaucratic values, rationality, efficiency, and accountability, within the complex dynamics of global governance. Thus, CPA holds strategic importance in bridging classical public administration theories with the adaptive governance demands of the globalization and digitalization era.

Keywords: *Administration, Bureaucracy, Comparison*

Submisi: 05-11-2025

Diterima: 06-11-2025

Dipublikasikan: 11-11-2025

PENDAHULUAN

Perkembangan studi administrasi negara tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma yang berlangsung secara historis dan epistemologis sejak abad ke-19 hingga era globalisasi saat ini. Pada awal kemunculannya, administrasi negara berakar pada pendekatan klasik yang menekankan rasionalitas birokrasi, hierarki, serta efisiensi organisasi sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber dan dikembangkan dalam konteks administrasi publik Amerika Serikat pasca-era Progressive (Denhardt & Denhardt, 2015).

Pendekatan klasik tersebut di atas, berorientasi pada model administratif universal yang diasumsikan dapat diterapkan di berbagai negara tanpa memperhatikan keragaman sosial, budaya, dan politik. Namun, realitas pasca-Perang Dunia II menunjukkan bahwa model tunggal administrasi tidak mampu menjelaskan kompleksitas birokrasi di negara-negara berkembang yang memiliki konteks sosial dan politik berbeda dengan negara Barat. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk memahami administrasi negara secara komparatif, yang kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai *Comparative Public Administration* (CPA) atau studi perbandingan administrasi negara.

Konteks historis kelahiran studi perbandingan administrasi negara muncul kuat pada dekade 1950-1970, saat ilmuwan seperti Fred W. Riggs dan Ferrel Heady mulai mempertanyakan keterbatasan pendekatan normatif dan menekankan pentingnya analisis lintas-negara dalam memahami dinamika pemerintahan (Riggs, 1964; Heady, 1996). Riggs melalui model *Prismatic Society* menjelaskan bahwa perbedaan struktur sosial, budaya, dan politik sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem administrasi publik. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan administratif yang universal menuju pendekatan kontekstual yang menekankan variasi antarnegara. Dengan demikian, studi perbandingan administrasi negara menjadi sarana untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan sistem birokrasi, struktur pemerintahan, serta pola pengambilan keputusan publik di berbagai negara.

Pentingnya studi perbandingan administrasi negara semakin menonjol ketika dunia memasuki fase modernisasi dan globalisasi pada paruh kedua abad ke-20. Modernisasi pemerintahan di negara-negara berkembang, terutama pasca-dekolonisasi, menimbulkan tantangan baru dalam membangun kapasitas administrasi publik yang efektif. Faktor-faktor seperti kolonialisme, warisan hukum, dan perbedaan ideologi politik menjadikan setiap sistem pemerintahan memiliki dinamika khas yang tidak dapat dijelaskan melalui teori administrasi Barat semata (Peters & Pierre, 2016). Selain itu, globalisasi mempercepat interdependensi antarnegara dan memperluas ruang interaksi antaraktor lintas batas, sehingga menuntut adanya pemahaman komparatif yang lebih mendalam terhadap praktik tata kelola publik. Fenomena ini mendorong pergeseran fokus studi administrasi negara dari orientasi domestik menuju perspektif global governance yang menekankan kolaborasi multilevel antara negara, lembaga internasional, dan aktor non-negara (Kettunen & Kallio, 2020).

Dalam konteks ilmiah, kemunculan studi perbandingan administrasi negara berperan penting dalam memperkaya pemahaman terhadap dinamika pemerintahan modern. Pendekatan komparatif memberikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, mengidentifikasi faktor keberhasilan reformasi birokrasi, serta

menelusuri bagaimana nilai-nilai administrasi public seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas diimplementasikan dalam konteks budaya yang berbeda (Osborne, 2021). Melalui perbandingan lintas-negara, ilmuwan administrasi publik dapat mengembangkan teori yang lebih inklusif dan adaptif terhadap variasi sosial-politik global. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat akademik tetapi juga praktis, karena memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem tata kelola yang sesuai dengan kondisi nasional dan tantangan global.

Namun demikian, meskipun signifikansi studi perbandingan administrasi negara telah diakui sejak lama, kajian historis terhadap akar lahirnya bidang ini masih relatif terbatas dalam literatur kontemporer. Banyak penelitian modern lebih berfokus pada isu-isu aplikatif seperti inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan digital governance, tetapi cenderung mengabaikan dinamika historis dan epistemologis yang membentuk dasar konseptualnya. Padahal, memahami genealogi perkembangan studi ini sangat penting untuk menilai arah evolusi pemikiran administrasi publik dan relevansinya dengan teori governance masa kini (UNDP, 2022).

Kekosongan tersebut di atas, menciptakan kesenjangan ilmiah yang perlu dijawab, terutama untuk memperkuat pemahaman bahwa pendekatan komparatif tidak lahir secara spontan, melainkan merupakan respons terhadap ketegangan intelektual antara teori administrasi universal dan kompleksitas konteks pemerintahan di dunia nyata.

Era global *governance* saat ini, ketika masalah administrasi publik semakin bersifat lintas batas seperti perubahan iklim, migrasi, dan tata kelola digital pemahaman historis terhadap lahirnya studi perbandingan administrasi negara menjadi semakin relevan. Perspektif historis tidak hanya membantu mengidentifikasi faktor pendorong munculnya studi ini, tetapi juga memperjelas bagaimana paradigma administrasi publik bertransformasi dari model klasik yang berorientasi negara ke model kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor global. Dengan demikian, penelusuran terhadap akar historis dan faktor penyebab lahirnya studi perbandingan administrasi negara menjadi krusial dalam memperkaya diskursus ilmu administrasi publik modern, sekaligus membuka ruang refleksi bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola yang lebih adaptif terhadap kompleksitas global kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran evolusi paradigma administrasi negara dan faktor-faktor yang mendorong lahirnya studi Perbandingan Administrasi Negara (*Comparative Public Administration/CPA*) dalam konteks globalisasi dan tata kelola modern.

Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap makna dan konstruksi konseptual yang berkembang dalam literatur akademik, sehingga relevan untuk penelitian berbasis teori.

Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang terdiri atas buku klasik, artikel jurnal bereputasi, dan hasil penelitian mutakhir dalam rentang tahun 2020–2024. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap tema utama, yaitu

perkembangan CPA dari paradigma klasik hingga global governance. Analisis dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema konseptual, seperti pergeseran paradigma, konteks sosial-politik kelahiran CPA, dan kontribusi tokoh-tokoh penting dalam pengembangan disiplin ini.

Proses analisis menggunakan pendekatan tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2019), dengan menelusuri pola hubungan antar-konsep untuk membangun kerangka argumentatif yang logis dan integratif. Keabsahan hasil analisis dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan dari literatur klasik dan kontemporer guna memperoleh interpretasi yang objektif dan kontekstual. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif-historis, tetapi juga reflektif terhadap relevansi CPA dalam menghadapi tantangan global saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evolusi Historis Studi Administrasi Negara: Dari Paradigma Klasik menuju Tata Kelola Kontemporer

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa studi administrasi negara telah mengalami transformasi konseptual dan paradigmatis yang panjang sejak kemunculannya pada akhir abad ke-19. Akar pemikiran klasik dapat ditelusuri dari karya seminal Woodrow Wilson (1887) dan Frank J. Goodnow (1900), yang menekankan dikotomi politik, administrasi serta pentingnya efisiensi birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Wilson menegaskan perlunya administrasi yang ilmiah dan netral terhadap politik, sedangkan Goodnow memisahkan fungsi pembuatan kebijakan (*policy*) dan pelaksanaan (*administration*) sebagai upaya rasionalisasi pemerintahan modern. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikembangkan oleh Luther Gulick melalui formulasi “POSDCORB” yang menegaskan administrasi publik sebagai ilmu manajerial yang berorientasi pada efisiensi dan koordinasi struktural.

Khuroshvili (2023) menegaskan bahwa paradigma klasik pada dasarnya berakar pada filsafat positivistik dan mekanistik, yang memandang organisasi publik sebagai sistem tertutup dan hierarkis. Namun, seiring dengan munculnya tantangan sosial, ekonomi, dan politik pasca-Perang Dunia II, pandangan ini mulai dipertanyakan. Studi-studi pada era 1960-1970-an, seperti yang dilakukan oleh Dwight Waldo, memperkenalkan kritik normatif terhadap reduksionisme administratif dan menyerukan pemulihan nilai-nilai etika, demokrasi, serta humanisme dalam praktik administrasi.

Perkembangan tersebut kemudian membuka jalan bagi lahirnya paradigma manajemen publik baru atau *New Public Management*, (NPM) pada dekade 1980–1990-an yang diusung oleh Osborne dan Gaebler (1992). NPM menggeser fokus administrasi dari kepatuhan prosedural menuju orientasi hasil (*performance orientation*), efisiensi pasar, dan kompetisi antarunit pelayanan publik. Dalam konteks ini, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai instrumen tunggal, melainkan sebagai bagian dari sistem manajerial yang mengadopsi praktik sektor swasta. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan

Krogh dan Triantafillou (2024), paradigma NPM juga menimbulkan kritik baru karena terlalu menekankan aspek efisiensi dan mengabaikan nilai-nilai kolaborasi serta legitimasi demokratis.

Sebagai respons terhadap keterbatasan NPM, paradigma *New Public Governance* (NPG) kemudian muncul pada awal abad ke-21. NPG menekankan pentingnya kolaborasi multiaktor, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam jaringan tata kelola (*governance networks*). Pergeseran ini, menurut Wei, Liu, dan Lyu (2024), tidak hanya menunjukkan perubahan institusional, tetapi juga transformasi epistemologis dalam ilmu administrasi publik, dari pandangan yang menitikberatkan pada struktur hierarkis menuju interaksi jejaring, partisipasi, dan adaptasi dalam konteks global yang kompleks.

2. Faktor-Faktor Pendorong Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara *Comparative Public Administration*, (CPA)

Lahirnya *Comparative Public Administration* (CPA) pada era 1950–1970-an merupakan konsekuensi langsung dari perubahan global pasca-dekolonisasi dan modernisasi di negara-negara berkembang. Berdasarkan sintesis literatur (Riggs, 1964; Heady, 1966; Wenzelburger, 2022), terdapat empat faktor utama yang mendorong munculnya CPA. Pertama, dekolonisasi memunculkan kebutuhan akan model administrasi publik yang sesuai dengan konteks sosial-politik lokal, karena sistem birokrasi kolonial dianggap tidak kompatibel dengan realitas negara baru. Kedua, teori modernisasi menempatkan administrasi publik sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan perbandingan lintas negara untuk memahami variasi kelembagaan dan perilaku administratif. Ketiga, globalisasi mempercepat pertukaran ide, teknologi, dan praktik pemerintahan, menuntut kerangka analisis yang mampu menjelaskan interdependensi antarnegara. Keempat, perbedaan budaya politik dan struktur kelembagaan memunculkan variasi dalam efektivitas birokrasi, yang tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik yang bersifat universalistik.

Fred W. Riggs menjadi figur sentral dalam pembentukan disiplin CPA melalui model *prismatic-sala-fused society*, yang menggambarkan transisi masyarakat dari struktur tradisional menuju modern, beserta implikasinya terhadap perilaku birokratik. Sementara itu, Ferrel Heady (1966) memperkaya CPA dengan pendekatan sistemik dan metodologi perbandingan yang lebih empiris, menekankan pentingnya konteks budaya dan politik dalam memahami fungsi administrasi publik di berbagai negara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa CPA tidak hanya merupakan cabang dari studi administrasi publik, tetapi juga upaya konseptual untuk menjembatani teori administrasi dengan realitas sosial-politik global.

3. Kontribusi Tokoh-Tokoh Kunci terhadap Pergeseran Fokus CPA

Kontribusi pemikiran para tokoh klasik dan modern telah memperluas cakrawala CPA dari analisis struktural ke arah jejaring dan kolaborasi global. Fred W. Riggs memelopori pendekatan ekologi administratif yang memandang birokrasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pendekatan ini kemudian diteruskan oleh Ferrel Heady yang mengusulkan tipologi sistem administrasi nasional sebagai dasar perbandingan empiris lintas negara.

Dwight Waldo memberikan sumbangan normatif dengan menolak pandangan positivistik dan menegaskan bahwa administrasi publik tidak bebas nilai. Ia menempatkan administrasi sebagai praktik moral dan politik yang harus mempertimbangkan legitimasi publik serta prinsip demokrasi. Di sisi lain, Osborne melalui gagasan *reinventing government* mendorong perubahan radikal dalam praktik administrasi publik dengan menekankan prinsip kewirausahaan, desentralisasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Kombinasi pemikiran para tokoh tersebut menghasilkan pergeseran fokus CPA dari studi struktur dan prosedur menuju analisis jejaring, kolaborasi, dan adaptasi terhadap tata kelola global. Dengan demikian, CPA tidak lagi terbatas pada perbandingan sistem administratif antarnegara, tetapi berkembang menjadi kerangka konseptual untuk memahami interaksi lintas batas dan dinamika global governance (Woelert, 2024).

4. Perbandingan Lintas Paradigma: Dari Birokrasi Klasik ke Governance Global

Perbandingan lintas paradigma menunjukkan bahwa setiap fase perkembangan administrasi publik memiliki karakteristik ontologis dan normatif yang berbeda. Paradigma klasik menekankan hierarki, rasionalitas legal, dan efisiensi mekanistik; birokrasi dipandang sebagai instrumen negara yang bertugas menjalankan hukum secara netral. Sebaliknya, paradigma NPM mengadopsi logika pasar dengan menekankan efisiensi, kinerja, dan akuntabilitas berbasis hasil. Dalam paradigma ini, birokrasi direduksi menjadi entitas manajerial yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented government*).

Sementara itu, paradigma NPG dan *global governance* menempatkan birokrasi dalam posisi baru sebagai fasilitator kolaborasi antaraktor, baik negara maupun nonnegara. Krogh dan Triantafillou (2024) menjelaskan bahwa NPG bukan sekadar lanjutan dari NPM, melainkan model reformasi yang menekankan koordinasi jejaring, partisipasi, dan nilai-nilai ko-produksi layanan publik. Artikel *Public Administration and Politics* oleh Turbulence (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa tantangan global seperti pandemi, krisis iklim, dan disinformasi digital memaksa birokrasi untuk beradaptasi menjadi lebih robust dan kolaboratif tanpa kehilangan legitimasi legalnya. Dalam konteks ini, konsep *strategic bureaucracy* (Woelert, 2024) menawarkan jalan tengah: mempertahankan rasionalitas formal Weberian namun mengintegrasikannya dengan kemampuan strategis dan adaptif terhadap kompleksitas global.

5. Implikasi terhadap Ilmu Administrasi Publik Masa Kini

Berdasarkan sintesis berbagai teori dan penelitian kontemporer, CPA tetap memiliki relevansi signifikan dalam menjelaskan dinamika tata kelola publik di era globalisasi dan digitalisasi. Pendekatan komparatif kini tidak hanya berfokus pada struktur administratif, tetapi juga pada pola interaksi lintas-level, mekanisme kolaborasi antaraktor, serta kapasitas adaptif lembaga publik dalam menghadapi ketidakpastian.

Studi bibliometrik oleh Wei et al. (2024) menegaskan bahwa tema seperti *network governance*, *digital bureaucracy*, dan *policy co-creation* menjadi pusat perhatian baru dalam riset global administrasi publik.

Dalam konteks ini, CPA berfungsi sebagai kerangka reflektif untuk menilai bagaimana nilai-nilai klasik, seperti akuntabilitas, rasionalitas, dan hierarki—dapat direinterpretasi dalam ekosistem *governance* yang bersifat dinamis. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip formal birokrasi dengan logika fleksibilitas jaringan serta partisipasi digital. Oleh karena itu, evolusi CPA menuju paradigma tata kelola global tidak hanya mencerminkan adaptasi konseptual, tetapi juga penataan ulang epistemologi administrasi publik agar lebih kompatibel dengan kompleksitas dunia kontemporer.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa *Comparative Public Administration* (CPA) lahir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma administrasi klasik yang terlalu berorientasi pada model Barat dan mengabaikan konteks sosial-politik negara berkembang. Seiring dengan perkembangan teori administrasi publik dari era klasik menuju *New Public Management* dan *New Public Governance*, CPA berevolusi menjadi pendekatan analitis yang menekankan pentingnya variasi, adaptasi, dan kolaborasi lintas negara dalam memahami tata kelola pemerintahan. Faktor historis seperti dekolonisasi, modernisasi, dan globalisasi menjadi pendorong utama munculnya CPA sebagai disiplin yang menjembatani teori dan praktik administrasi publik. Dalam konteks kontemporer, CPA berperan penting dalam memperkaya wacana global *governance* dengan menegaskan bahwa efektivitas administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Oleh karena itu, pemahaman komparatif terhadap administrasi publik bukan hanya bernilai akademis, tetapi juga strategis dalam merancang sistem pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. 2019. Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Creswell, J. W. 2018. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. 2015. *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. 2018. *Reformasi birokrasi di Indonesia: Mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, dan adil*. Gadjah Mada University Press.
- Goodnow, F. J. 1900. *Politics and administration: A study in government*. Macmillan.

- Heady, F. 1996. *Public administration: A comparative perspective* (6th ed.). Marcel Dekker.
- Hood, C. 1991. A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Khuroshvili, G. 2023. Bureaucratic modernization and the crisis of Weberian rationality. *Public Administration Review*, 83(5), 1104–1116.
<https://doi.org/10.1111/puar.13645>
- Kettunen, P., & Kallio, J. 2020. Comparative public administration and the challenge of global governance. *International Journal of Public Sector Management*, 33(4), 451–468. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2020-0023>
- Krogh, A. H., & Triantafillou, P. 2024. Public management and the politics of turbulence: Reconsidering the New Public Governance paradigm. *Public Management Review*, 26 (2), 157–176. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2220158>
- Kurniawan, A., & Rachmawati, T. 2021. Digital governance and bureaucratic reform in Indonesia: Toward adaptive public administration. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(2), 112–126. <https://doi.org/10.20473/jian.v17i2>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2018. *Qualitative data analysis: A methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Osborne, D. 2010. *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Osborne, D. 2021. Public value and collaborative governance in the digital age. *Public Management Review*, 23 (12), 1819–1836.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1803113>
- Peters, B. G. 2019. *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (4th ed.). Edward Elgar.
- Peters, B. G., & Pierre, J. 2016. *Comparative governance: Rediscovering the functional dimension of governing*. Cambridge University Press.
- Raadschelders, J. C. N. 2022. *Public administration: The interdisciplinary study of government*. Oxford University Press.
- Riggs, F. W. 1964. *Administration in developing countries: The theory of prismatic society*. Houghton Mifflin.
- Stillman, R. J. 2019. *Public administration: Concepts and cases* (10th ed.). Cengage Learning.
- Turner, M. 2020. Administrative reform and the challenges of comparative governance. *International Review of Administrative Sciences*, 86(2), 255–273.
<https://doi.org/10.1177/0020852319847256>

UNDP. 2020. Global governance report: Institutions for the 21st century. United Nations Development Programme.

UNDP. 2022. Public administration in a changing world: Global governance and digital transformation. United Nations Development Programme.

Wei, L., Liu, S., & Lyu, H. 2024. Network governance and digital bureaucracy: Trends in comparative public administration research. *Governance*, 37 (3), 522–540.
<https://doi.org/10.1111/gove.12892>

Weber, M. 1947. The theory of social and economic organization. Free Press.

Wenzelburger, G. 2022. Comparative bureaucracy: Policy capacity and responsiveness in turbulent times. *Public Policy and Administration*, 37(4), 467–486.
<https://doi.org/10.1177/09520767221076329>

Wilson, W. 1887. The study of administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.
<https://doi.org/10.2307/2139277>

Woelert, P. 2024. Strategic bureaucracy in global governance: Revisiting Weber under complexity. *Policy and Society*, 43(1), 65–84.
<https://doi.org/10.1093/polsoc/pwaa031>

TENTANG PENULIS